

## **PROSES PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

Asriel Kein (14010112170002)

Department Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

### ***Abstract***

Village funds are one of the priority government policies to finance development and empowerment of communities whose implementation is prioritized on a self-managed basis using local resources or raw materials, and strived to absorb more local people's labor. This study aims to determine the process of implementation of village funds used in accordance with the program, the results of the implementation of village funds and community involvement in the Village District Ponggok Polanharjo Klaten. The research approach used is descriptive qualitative. Using data collection techniques through interviews to informants that are considered potentially to provide information about the process of implementing village funds in the development of Ponggok Village, Polanharjo Sub-district, Klaten Regency, also through interviews and documentation of the results of the implementation of village funds.

The research results indicate that the process of implementation of village funds is done well and in accordance with the needs of Ponggok village community. This can be evidenced by the number of development programs that have been realized in accordance with the development plan that has been established by the village government through village meetings. From the results of 18 (eighteen) development activities that have been planned all the time has been realized with 15 (fifteen) physical activities in the form of suggestions and services and 2 (two) community empowerment and 1 (one) community development, although not yet realized the name of the community who know that the government villages prioritize village funds for physical development and community empowerment, in accordance with the results of village meetings. However, development activities in this case physical development in the form of suggestions and prasanan and community empowerment realized well.

The conclusion of the implementation of village funds by the village government of Ponggok shows that the Implementation of Village Funds in the Development of Ponggok Village, Polanharjo Sub-district, Klaten Regency is said to be effective. Due to the involvement of the community in the implementation of village funds in Ponggok Village, where the community has been involved in the preparation of the development plan until the implementation of the programs.

**Keywords: Village Funding, Implementation, Involvement**

## **I. PENDAHULUAN**

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Dana Desa (DD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Dana Desa (DD) adalah Penggunaan Dana Desa sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Pengelolaan Dana Desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk menepohong sejauh mana proses pelaksanaan Dana Desa (DD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian ke Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat mengenai penjelasan program Dana Desa (DD) dan bagaimana pengelolaannya serta mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi untuk memperoleh kembali pemecarahan terhadap segala permasalahan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Metode dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian /identifikasi masalah.

Metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi untuk memperoleh kembali pemecarahan terhadap segala permasalahan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahap Pembentukan Pengelola Dana Desa di Desa Pongkok**

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan oleh Kepala Desa atau melalui rapat intern Tim Pengelola Kegiatan, yang kemudian dibuatkan Berita Acara'nya, sehingga masing-masing Tim mempunyai tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya secara jelas sehingga tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing Tim, dan yang harus digaris bawahi Tim Perencana dan Tim Pengawas harus dari unsur Pemerintah Desa, sedangkan untuk Tim Pelaksana dapat dari unsur lembaga kemasyarakatan desa yang di tempatkan dalam Tim Pengelola Kegiatan. Pembentukannya tim TPK dibentuk diawal tahun periode kepengurusan kepala desa menjabat pada tahun 2015. Proses pembentukannya pada saat itu adalah diadaakannya rapat desa dimana semua lembaga desa turut hadir dalam proses tersebut,

serta sistem pemilihannya dengan cara musyawarah desa dimana setiap RW mengirimakan perwakilan untuk menjadi pengurus tim pelaksana yang nanti akan dipilih oleh masyarakat dan lembaga desa.

### **Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa**

Masyarakat Desa Ponggok mempunyai antusias yang tinggi dalam mengelola desa tempat mereka tinggal. Antusias merekalah yang menjadikan Desa Ponggok menjadi berkembang sampai saat ini. Keterlibatannya masyarakat Desa Ponggok dapat dirasakan oleh pemerintah desa. Salah satunya dengan tingginya antusias masyarakat terhadap keterlibatannya dalam membantu memanfaatkan dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Masyarakat Desa ponggok terlibat sebagai subjek atau perilaku dalam pembangunan desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang biasa disebut musrenbang, pelaksanaan kegiatan dan kontrol pada pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu.

### **Proses Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan**

Dengan adanya dana desa masyarakat bisa merasakan manfaat dari hasil pembangun yang sudah terealisasikan pemerintah desa dalam hal ini tim pengelola kegiatan yang berkerja sama dengan lapisan masyarakat untuk turut membantuh dalam program pembangunan di Desa Ponggok, seperti yang di rasakan masyarakat dengan pembangunan saluran limbah di RW II dan sumur pantek di RW III, masyarakat Desa Ponggok merasakan maanfaat dana desa yang kelola oleh pemerintah desa untuk pembangunan Talud sungai Jeblangan, Talud sawah saluran Tugiman dan Talud sayap Jembatan kuningan sehingga masyarakat bisa beraktifitas dengan mudah dan mendapat air yang bisa terhubung langsung ke saluran persawahan, serta pembangunan saluran air bersih umbulsari yang sangat bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya. Pemerintah desa Ponggok memanfaatkan dana desa untuk pemberdayan masyarakat dengan adanya program senam sehat setiap hari jumat di depan kantor keluran, dan diwajibkan bagi seluruh masyarakat desa ponggok turut hadir dalam acara senam sehat sehingga meningkatkan sehatan bagi seluruh masyakat Desa Ponggok. Tidak hanya senam sehat tetapi pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk mengadakan pelatihan bagi masyarakat Desa Ponggok.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pemerintah Desa Ponggok sudah meningkatkan pembangunan di Desa Ponggok dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasikan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrembang. Dari hasil 18 (delapan belas) kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan 15 (lima belas) kegiatan fisik berupa saran dan prasana serta 2 (dua) pemberdayaan masyarakat dan 1(satu) pembinaan kemasyarakatan, meskipun belum terealisasikan namun masyarakat yang mengetahui bahwa pemerintah desa memprioritaskan dana desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan hasil musrenbang. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam hal ini pembangunan fisik berupa saran adan prasanan serta pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik.

Kendala-kendala tersebut yaitu lambatnya pencairan dana desa. Seringga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Ditambah lagi kendala pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Ada beberapa masyarakat yang tidak memberikan izin untuk lahnya dijadikan jalan atau dibanguni fasilitas umum.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Drijver dan Sajise (Sutrisno, 2005) *Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat.*

Nurmianto Eko 2008 *Ergonomi: Konsep Dasa dan Aplikasinya.*

Paul G, Friedman 1992: *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*

Pogdan dan Taylor 1984: *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: TASITO

Wahyudi Kumorotomo dan Erwan Agus Purwanto 2005: *Birokasi Publik dalam Sistem Politik Semi-parlementer*